

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offest.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi.
- Mursiyadi. (2010). *Akuntansi Dasar*. Bogor :Ghalia Indonesia.
- Priantara, D. (2011). *Kupas Tuntas :Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*. PT Index.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan :Teori dan Kasus*. Jakarta: Selemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi (Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan)* (S. Saat (ed.)).
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Indeks Jakarta.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama :Bandung.
- Suandi, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Selemba Empat
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2016). *Perpajakan :Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empatdua Media.
- Sugiyono. (2017.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke-3).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta :Bandung.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks

Peraturan Perundang-undangan

- Direktorat Jendral Pajak. (2007). *Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat*.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/12752>
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021*.<https://id.scribd.com/document/510501376/ND-727-Update-ND-228-All#>
- Peraturan Menteri Keuangan. (2007). *Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak dengan Kriteria Tetentu dalam Rangka Pengembaian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167741/pmk-no-192pmk032007>
- Peraturan Menteri Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik*

Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. <https://lmatsconsulting.com/wp-content/uploads/2020/06/PMK-Nomor-189-PMK.03-2020.pdf>

Peraturan Pemerintah. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.*

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak. (2011). *Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak.* https://www.pajakku.com/tax-guide/9516/SE_DIRJEN_PJK/SE-98/PJ/2011

Undang-Undang. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.* [https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU No. 36 Thn 2008.pdf](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf)

Undang-Undang. (2021). *Undang-Undang Tentang Harmonisasi Perpajakan.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Jurnal-Jurnal

Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>

Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>

Eva, V. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ghozali, S., & Rahmawati, M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.

Hura, A., & Molinda Kakisina, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>

Irwansah, & Akbal, M. (2018). Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makassar. *Sereal Untuk*, 51(1), 24.

- Jannah, Z. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha*. <https://doi.org/10.1109/ciced.2018.8592188>
- Khasanah, S. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*.
- Prakoso, A. (2019). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Suparyanto dan Rosa. (2020). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Ekonomi Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Suparyanto Dan Rosad*, 5(3), 248–253.
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 912–921. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/14530>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Winerungan, O. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung*.

Referensi Lainnya

- Penyelenggaraan Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat
<https://peraturanpajak.com/2018/02/05/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-22-pj-2007/> diakses 05 Februari 2018
- Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
<https://sadarpajak.com/visi-misi-kpp-pratama/> diakses 01 Juni 2018
- Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan
<https://id.scribd.com/document/510501376/ND-727-Update-ND-228-All> diakses 24 Juni 2021

Mengenal Self Assesment Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>

diakses 09 September 2022

Penerimaan Pajak Per Januari 2023

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5214150/sri-mulyani-kantongi-penerimaan-pajak-rp-1622-triliun-sepanjang-januari-2023> diakses 22 Februari 2023

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

<https://amp.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-non-karyawan-hanya-2684> diakses 02 April 2023

Wajib Pajak Bagi Penghasilan Anak Dibawah Umur

<https://www.pajakku.com/read/5dc3f218387af773a9e01112/Anak-di-bawah-umur-berpenghasilan-wajib-bayar-pajak> diakses April 2023

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

<https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak> diakses 08 Juli 2023